

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Penelitian ini telah menjelaskan tentang Model *Pentahelix Collaborative Governance* dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI. Maka kesimpulan dalam penelitian faktor penghambat dan factor pendukung, serta strategi yang dilakukan untuk solusi penanganannya. meliputi permasalahan yang dihadapi dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI mulai dari permasalahan kecilnya anggaran serta kolaborasi yang dioptimalkan dengan para Pengusaha dan Media Massa.

Terdapat beberapa faktor penghambat kolaborasi yakni: tugas, fungsi dan kewenangan yang masih tersekat-sekat dalam urusan sektoral masing-masing *Stakeholder*, serta belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi Lemhannas RI khususnya Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dari para *Stakeholder*. Strategi yang dilakukan peneliti dalam menghadapi faktor penghambat adalah Penegasan kembali Tugas dan Fungsi Kolaborasi serta penguatan pada Lemhannas Sendiri khususnya Kedeputian Taplai Kbs. dan Biro Humas untuk lebih intens tentang publikasi tugas dan fungsi Lemhannas RI, Melakukan Kunjungan kerja oleh Pimpinan Lemhannas dan didampingi Kepala Biro Humas dan pejabat lainnya ke Kantor Redaksi Media Massa dan bertemu Pimpinan Redaksi dan pejabat lainnya membahas tentang bentuk kerjasama. Begitu juga kunjungan ke Para Pengusaha oleh pimpinan Lemhannas dan kepala Biro bertemu dengan pejabat untuk berdiskusi dan berkolaborasi tentang pembiayaan dan kegiatan Taplai Kbs.

Serta penguatan Komunikasi dan koordinasi dengan Stakeholder terkait guna penguatan kegiatan Taplai Kbs. Lemhannas RI.

Faktor pendukung Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI diantaranya adalah seperti dukungan kebijakan dari Pemerintah (K/L) dengan semakin meningkatnya anggaran Taplai Kbs. setiap tahunnya serta banyaknya pejabat tinggi yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Taplai Kbs. Makin banyaknya Media Massa yang mengundang Gubernur Lemhannas RI untuk jadi Narasumber baik di Media Massa, Perguruan Tinggi, Seminar para pengusaha dll. Yang menandakan Lemhannas sangat dipandang dan di hormati. Serta Animo para kelompok Pengusaha untuk mau bekerjasama dengan Lemhannas berlanjut di selenggarakannya MoU dan diteruskan ke PKS dengan Lemhannas RI.

Serta Strategi yang dilakukan peneliti meliputi evaluasi, identifikasi permasalahan dan kendala-kendala serta analisis data untuk peningkatan besarnya anggaran Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI seperti pelibatan Pimpinan Media Massa dan Pimpinan Pengusaha dalam hal perumusan kebijakan dalam acara FGD pada Tema Taplai Kbs. dan kajian lainnya di Lemhannas RI, membuat Program Pembinaan dan, koordinasi dan konsultasi dengan DPR RI guna pembuatan UU tentang Lemhannas RI, Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dewan Pers, Lembaga Penyiaran (Stasiun TV, Media Cetak, Online dan Radio), Perhimpunan Pengusaha, *Forum Coffee Morning* Lemhannas RI dengan Para Pemimpin Redaksi dan Pengusaha, serta hasil kajian strategis tentang pentingnya Tapalikbs.

Dampak dari Strategi yang disarankan peneliti adalah akan semakin meningkat dan besarnya anggaran/pembiayaan untuk kegiatan Taplai Kbs. baik dari APBN atau Non APBN, semakin tingginya animo para Stakeholder

untuk mau bekerjasama dengan Lemhannas RI, Pemberitaan tentang Lemhannas RI tentang kegiatan Taplai Kbs. dan pengetahuan, pemahaman, implementasi nilai-nilai kebangsaan serta kesadaran tentang berbangsa dan bernegara semakin tinggi akibat seringnya pemberitaan di media massa. Serta kesadaran para pengusaha tentang nilai-nilai kebangsaan dalam berusaha semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas mendukung Pembangunan Nasional.

B. Saran.

Menindaklanjuti kesimpulan hasil penelitian *Collaborative Governance Model Pentahelix* dalam Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, beberapa saran atau rekomendasi guna perbaikan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan ke depan, untuk menjawab permasalahan riil Lemhannas RI dan sinergitas antar *stakeholder* yang selama ini yang belum optimal. Berikut dipaparkan beberapa rekomendasi tersebut:

1. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk Lemhannas RI sebagai solusi dalam menentukan arah dan kebijakannya pada Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan agar dapat lebih optimal.
2. Lemhannas RI perlu melakukan Kolaborasi dengan banyak Pihak yang Strategis seperti Pemerintah (K/L), Perguruan Tinggi, Media Massa, Pengusaha, dan Masyarakat sebagai Sumber Daya melalui Perjanjian Kerja Sama atau MoU yang memuat peran, tugas, wewenang dan tanggungjawab sehingga memiliki komitmen dalam melakukan dukungan kegiatan dan anggaran Taplai Kbs.

3. Diperlukan Penelitian lanjutan guna merumuskan Model dan Strategi yang lebih tepat dan tajam terkait dengan Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI, mengingat penelitian ini merupakan penelitian awal dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

- Adies, Kadir. (2018). Menjaga Moral Pejabat Publik. Jakarta : Penerbit Merdeka Book.
- Astawinetu, D. E. D., & Handini, D. S. (2020). Manajemen Keuangan: Teori dan Praktek (D. E. D. Astawinetu & D. S. Handini (eds.)). Scopindo Media Pustaka.
- Agus, S., & Irfani. (2020). Manajemen Keuangan Dan Bisnis (Bernadine (ed.)). PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ansell Christ and Gash Alison. 2007. "Colaborative Governance in Theory and Practice". Journal of Public Administrations Research. Barkeley, 28 (2), 81 – 128.
- Abdul Kadir (2019) Memudarnya Nilai-nilai Pancasila pada Generasi Muda, diakses dari www.kompasiana.com
- Alimin Anwar (2020) Budaya Indonesia Menghilang Seiring Waktu, diakses dari www.tribunnews.com
- Beny Sanjaya (2018) Lembaga Negara, Tujuan dan Fungsi, diakses dari www.prestasireformasi.com
- Conney Stephanie (2022) Facebook hapus 25 Juta konten ujaran kebencian selama tahun 2021): (www.kompas.com)
- Darsono Dan Tjatjuk, Siswandoko, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21, Nusantara Consulting, Jakarta
- Hasil Kajian Kedeputan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan, 2021
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo
- Islamy. La Ode Syaiful. 2018 Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi: Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press
- Kesbangpol (2021) Hoax dan ujaran kebenci dan factor utama dalam disintegrasi bangsa). www.kesbangpol.kemendagri.go.id
Kesbangpol

- Kurniadi. 2020. *Collaborative Governance* dalam Penyediaan Infrastruktur: Yogyakarta, Deepublish (Grup penerbitan CV. Budi Utama).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lemhannas RI (2020) Lemhannas RI selenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual, diakses dari www.lemhannas.go.id
- Moelong J. Lexy, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musthafa (2017:3), Manajemen Lembaga Keuangan, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017
- Meiga Ervianti. 2018. "Faktor-Faktor yang menghambat Collaborative Governance dalam Implementasi dan Manajemen Rekayasa". Jurnal Ilmiah Universitas Andalas, 31 (8), 117-138.
- M. Nafarin (2007:11), "Anggaran adalah rencana yang tercatat untuk operasi suatu organisasi,
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sururi Ahmad. 2018. "Collaborative Governance Sebagai Inovasi kebijakan Strategis". Jurnal Kebijakan Publik Gadjah Mada University, 11 (3), 17 -31.
- Septiaji Eko Nugroho. 2021, "Kolaborasi, Riset, dan Volunterisme Membangun Resiliensi Dalam Gejolak Pandemi". "Jurnal Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)".
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isi Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: SUN
- Yusuf, MA. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro University

Peraturan/Perundangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Lemhannas RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemda Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Intruksi Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.